



**dispari**  
KABUPATEN  
MOJOKERTO

**Mojokerto**  
Full of Majapahit Greatness

# RENCANA KERJA 2024

**DINAS PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MOJOKERTO**



[dispari.mojokertokab.go.id](http://dispari.mojokertokab.go.id)

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat terlaksana. Rencana Kerja disusun berpedoman pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Setiap satuan Kerja Perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun. Materi Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Daerah. Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pembangunan di sektor pangan dan perikanan.

Sebagaimana disadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah akan terwujud apabila sinergi antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) berjalan dengan baik, maka sangat diharapkan partisipasi aktif dari semua pihak sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya, tidak lupa kami menghaturkan banyak terima kasih atas bantuan berbagai pihak dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Mojokerto,        September 2023

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**Drs. MOKHAMAD RIDUWAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721026 199201 1 002

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penyusunan .....	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b> .....	<b>6</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perikanan .....	29
2.4. Reviu terhadap RKPD .....	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	39
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan dan Perikanan .....	44
3.3. Program dan Kegiatan (TC.33) .....	45
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT         DAERAH</b> .....	<b>58</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

### Halaman

<b>Tabel 2.1</b>	Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan) .....	8
<b>Tabel 2.2</b>	Rencana Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2022 ....	18
<b>Tabel 2.3</b>	Data Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto... ..	21
<b>Tabel 2.4</b>	Dana Bansos Tunai Anggaran DTU 2% .....	22
<b>Tabel 2.5</b>	Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	25
<b>Tabel 2.6</b>	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan .....	27
<b>Tabel 2.7</b>	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 .....	36
<b>Tabel 2.8</b>	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan .....	40
<b>Tabel 3.1</b>	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	44
<b>Tabel 3.2</b>	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	46
<b>Tabel 3.3</b>	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 .....	49
<b>Tabel 4.1</b>	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pangan Dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 .....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan misi kedua Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto yakni **“Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan”**, maka ditetapkanlah sasaran Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto yaitu “Meningkatnya Ketersediaan Pangan” dan “Meningkatnya Produksi Perikanan”

Untuk dapat mewujudkan misi dan sasaran tersebut, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Selanjutnya, Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD). Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan bahan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
  14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 ;
  15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto;
  16. Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Nomor 188/50.1/416-109/2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto 2024 selain untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2022, reviu pelaksanaan program / kegiatan tahun 2021 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah menyesuaikan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2023.

### **1.4 Sistematika Penyusunan**

Dokumen Renja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

## Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

## Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Perikanan
- 2.4 Reviu Terhadap RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan
- 3.3 Program dan Kegiatan

## Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

## Bab V Penutup

**BAB II**  
**Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan**  
**Tahun Lalu**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Perikanan sampai dengan tahun 2022, berdasarkan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran (output) dan hasil (outcome). Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

1. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

Pada 2022, anggaran pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto sebelum Perubahan APBD 2022 sebesar Rp. 11.022.360.000,00 (*Sebelas Milyar Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), meliputi Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) anggaran DAK untuk pembangunan lumbung pangan masyarakat pada 2 (dua) lokasi prioritas di Desa Leminggir Kecamatan Mojosari dan Desa Ngabar Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan setelah PAPBD 2021 pagu anggaran sebesar Rp. 12.271.364.700,00 (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) yang dianggarkan untuk 8 Program, 16 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan.

Pada 2023, penyediaan anggaran untuk menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 8.178.010.900,00 (*Delapan Milyar Seratus Tujuh Delapan Juta Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini

Tabel 2.1  
Tabel T-C.29 (dalam Lampiran Permendagri 89 Tahun 2017)  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2021  
Dinas pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)			
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Perikanan											
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	85,76 (A)	74,26 (BB)	-	79,16 (BB)	-	79.16 (BB)	79,16 (BB)	95,6%		
01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah bernilai baik	100 %	100 %	4 dokumen	4 dokumen	100	100%	100%	20%	
01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	20%
01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	20%
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	20%

		2.02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%
01		2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	20%
01		2.06	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%
			0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%

			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%
			07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%
			08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman kunjungan tamu	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	-	20%
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas, rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%
01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	20%
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100	4 orang	4 orang	20%
01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	100%	100%	100%	100	100%	100%	20%

01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dilakukan pemeliharaan/perpanjangan perizinan	30 kendaraan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	30 kendaraan	12 bulan	20%
		09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	4 gedung	4 gedung	4 gedung	4 gedung	100	4 gedung	4 gedung	20%
		10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%
2	09			<b>Urusan Pemerintah Bidang Pangan</b>									
2	09	02		<b>Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</b>	<b>Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan</b>	100 %	-						20%
2	09	02	201	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan infrastruktur lumbung pangan	2 kelompok	-	1 kelompok	1 kelompok	100	2 kelompok	1 kelompok	20%
			01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan infrastruktur lumbung pangan	2 kelompok	-	1 kelompok	1 kelompok	100	2 kelompok	1 kelompok	20%
2	09	03		<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan</b>	98,0 %	-						20%

2	09	03	2 . 0 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan dan Laporan Harga Pangan	13 dokumen	12 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100	12 dokumen	13 dokumen	20%
			0 1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	20%
			0 2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang diberi bantuan benih pangan lokal	3 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	100	2 kelompok	2 kelompok	20%
			0 4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan pengawasan distribusi dan harga pangan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	20%
			0 6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah waktu penyediaan biaya operasional TTIC Kabupaten Mojokerto	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	20%
2	09	03	2 . 0 2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan gabah dan sarana prasarana	93 ton							20%
			0 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan gabah dan sarana prasarana	93 ton	0 ton	90 ton	0 ton	0	90 ton	0 ton	20%
			0 4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah waktu penyediaan biaya pemeliharaan cadangan pangan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	-	20%

					Pemerintah Kabupaten/Kota								
2	09	03	2 . 0 4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan	53 desa	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	53 Desa	2 jenis	20%
			0 1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen pph konsumsi dan identifikasi jenis tanaman pangan P2L	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	20%
			0 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan	53 desa	30 Kelompok	30 kelompok	30 kelompok	100%	53 Desa	30 kelompok	20%
			0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah rapat koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-	20%
2	09	04		<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>Persentase Desa Rawan Pangan yang Ditangani</b>	<b>42 %</b>	25%	25%	25%	100%	8%	25%	20%
2	09	04	2 . 0 1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen penyusunan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%
			0 1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan	Jumlah dokumen penyusunan analisis peta	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%

				Kerentanan Pangan	ketahanan dan kerentanan pangan								
2	09	04	2 . 0 2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang dilakukan penanganan kerawanan pangan	2 desa	6 kali	6 kali	6 kali	100%	2 desa	6 kali	20%
			0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang dilakukan penanganan kerawanan pangan	2 desa	6 kali	6 kali	6 kali	100%	2 desa	6 kali	20%
2	09	05		<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>Persentase jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan</b>	<b>100%</b>					<b>50%</b>		<b>20%</b>
2	09	05	2 . 0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengawasan keamanan pangan	10 lokasi	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	10 lokasi	1 jenis	20%
			0 1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan pelaku usaha pangan	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100%	50 orang	50 orang	20%
			0 2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan barang usaha pangan sebagai fasilitas menuju sertifikasi	2 kelompok	-	-	-	-	2 kelompok	-	20%
			0 3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan usaha yang bergerak dibidang PSAT	9 kecamatan	-	-	-	-	9 kecamatan	-	20%

			05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengambilan sampel mutu keamanan pangan	10 lokasi	-	-	-	-	10 lokasi	-	20%
3				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									
3	25			Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									
3	25	03		<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap</b>	3 %					2%		20%
3	25	03	201	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	6 kelompok	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	6 kelompok	1 jenis	20%
			01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	jumlah dokumen data dan informasi	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	20%
			02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok penerima bantuan prasarana usaha perikanan tangkap	3 kelompok	-	-	-	-	3 kelompok	-	20%
			03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana usaha perikanan tangkap	3 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	100%	3 kelompok	5 kelompok	20%

3	25	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	10 %					10%		20%
3	25	04	2 . 0 4		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok budidaya yang menerima bantuan, pembinaan dan pemantauan	6 kelompok	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	6 kelompok	3 jenis	20%
			0 1		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi produksi perikanan budidaya	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	20%
			0 2		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi benih dan calon induk	3,5 juta ekor	3.152.400 ekor	3 juta ekor	3.152.400 ekor	105%	3 juta ekor	3.152.400 ekor	20%
			0 3		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok penerima sarana pembudidayaan ikan	6 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	100%	6 kelompok	10 kelompok	20%
			0 4		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha perikanan budidaya yang dilakukan pemantauan kesehatan ikan	15 unit usaha perikanan budidaya	-	-	-	-	15 unit usaha perikanan budidaya	-	20%
			0 5		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pelaksanaan temu teknis / temu usaha pembudidayaan ikan	2 kali	50 orang	50 orang	50 orang	100%	2 kali	50 orang	20%

3	25	06			<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</b>	2 %							20%	
3	25	06	2	0	2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah sosialisasi standar usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	6 kali	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	20%
			0	1		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah sosialisasi dan pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	6 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	6 kali	2 kali	20%
3	25	06	2	0	3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana usaha perikanan skala mikro dan kecil	4 kelompok	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	4 kelompok	1 jenis	20%
			0	2		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana pengolahan dan pemasar hasil perikanan	4 kelompok	18 kecamatan	18 kecamatan	18 kecamatan	100%	4 kelompok	18 kecamatan	20%

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 11.022.360.000,00 ( Sebelas Milyar Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ), setelah PAPBD bertambah menjadi Rp. 12.271.364.700,00 ( Dua Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah ), anggaran tersebut bertambah Rp. 1.249.004.700,00 ( Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah ) mengingat ada tambahan untuk Dana Transfer Umum (DAU) 2 % sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Dana Insentif Daerah (DID) dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat pasca COVID-19.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dituangkan dalam 8 ( delapan ) Program, 16 ( enam belas ) Kegiatan serta 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan. Berikut rencana kinerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021 yang sasaran dan indikator kerjanya sesuai dengan Renstra 2021 – 2026 :

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kinerja Dinas Pangan dan Perikanan**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Target	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,16 (BB)		6.420.983.700,00
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63		

		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	90 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90 %		
3	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	100 %	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Keadaulatan dan Kemandirian Pangan	2.100.000.000,00
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	2100 Kkal/Kap/Hari	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.165.791.000,00
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	57 gr/Kap/hari	Program Penanganan Kerawanan Pangan	50.000.000,00
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	102.340.000,00
4	Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	1.339.558 Kg	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.129.250.000,00
		Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	159.120 Kg	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	90.000.000,00
		Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	973.093 Kg	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	138.000.000,00

Tingkat capaian anggaran tahun 2022 Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah **88.68** % (Delapan Puluh Delapan koma Enam Puluh Delapan Persen).

- a. Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan kegiatan DAK Fisik penugasan bidang pertanian untuk pembangunan lumbung pangan masyarakat pada 2 (dua) lokasi prioritas yaitu di Desa Leminggir Kecamatan Mojosari dan Desa Ngabar Kecamatan Gedeg sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah) dan penunjang sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) capaian realisasi anggaran sebesar 98,94 % dengan capaian kinerja 100 % telah terbangun lumbung pangan masyarakat beserta sarana pendukungnya pada 2 (dua) lokasi tersebut.
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 2.165.791.000,00 capaian realisasi anggaran sebesar 69,41 % telah dilaksanakan semua kegiatan maupun sub kegiatannya. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dilaksanakan pada triwulan 2 yaitu bulan 17 Juni 2022, dengan berbagai macam lomba antara lain lomba produk pangan olahan dan cipta menu B2SA. Sedangkan pada sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia disamping anggaran berasal dari APBD juga ada tambahan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 389.984.100,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) tidak dapat direalisasikan yang semula untuk pengadaan gabah yang akan diserahkan kepada 2 (dua)

kelompok, namun tidak bisa diserahkan karena ada kenaikan harga gabah di pasaran sehingga tidak sesuai dengan komponen harga yang ada pada aplikasi SIPD.

Sedangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, pengadaan gabah harus melalui BUMN / BUMD, yang selanjutnya bekerjasama dengan Perum Bulog Sub Divisi Regional Surabaya Selatan untuk penyediaan dan pengelolaan cadangan beras Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto memiliki stok cadangan pangan, sebagaimana data berikut :

Tabel 2.3  
Data Cadangan Pangan Pemerintah  
Kabupaten Mojokerto

No	Tahun	Jumlah
1	2019	30,769 ton gabah (setara 19,077 ton beras)
2	2020	74,546 ton gabah (setara 46,964 ton beras)
3	2021	67,817 ton beras
4	2022	101,746 ton beras
5	Sampai dengan Mei 2023	100,746 ton beras

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah pada 2021 sudah dilengkapi dengan MoU, Perjanjian Kerjasama dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Sampai dengan akhir Mei 2023 stok akhir cadangan pangan sebesar 100,746 ton karena pada Februari 2023 dikeluarkan 1 ton untuk bantuan bencana banjir di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan tambahan Dana Transfer Umum (DTU) 2 % sebesar Rp. 252.000.000,00 untuk sewa angkut komoditas strategis untuk kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) hanya terealisasi sebesar 9 % atau sebesar Rp. 21.783.080,00 (Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Rupiah), tetapi pelaksanaan Gelar Pangan Murah di beberapa titik

sasaran yaitu di desa rentan rawan pangan sesuai dengan data pada FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Kabupaten Mojokerto atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan desa dengan aksesibilitas pangannya sulit, misalnya jauh dari pasar desa maupun pasar kecamatan, yang dilaksanakan mulai 7 sampai 22 Desember 2022. Walaupun serapan anggaran hanya 9 %, namun pelaksanaan Gerakan Pangan Murah tetap terlaksana dan hal ini menunjukkan efisiensi anggaran. Dari anggaran Dana Transfer Umum (DTU) 2% sejumlah Rp. 500.000.000,00, untuk anggaran sewa angkut komoditi strategis sebesar Rp. 252.000.000,00, sisanya sebesar Rp 248.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) digunakan untuk bantuan sosial tunai berupa uang yang diberikan kepada para anggota kelompok bidang pangan dan perikanan, sebagaimana table di bawah :

Tabel 2.4  
Dana Bansos Tunai Anggaran DTU 2%

No	Jenis Kelompok	Jumlah Penerima	Besaran Bansos	Bidang Pengampu
1	Kelompok Wanita Tani (KWT)	160 orang	@Rp. 450.000	Konsumsi dan Keamanan Pangan
2	Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar)	186 orang	@Rp. 450.000	Usaha dan Agribisnis Pertanian
3	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	79 orang	@Rp. 450.000	Produksi Perikanan
4	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	84 orang	@Rp. 450.000	Produksi Perikanan

Bantuan sosial berupa uang yang diberikan kepada anggota kelompok bidang pangan dan perikanan sebagai bentuk perhatian Pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Mojokero dalam pengendalian inflasi, serta menindaklanjuti Rakorpusda Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur pada 14 September 2022.

Sedangkan pelaksanaan penyerahan bantuan sosial berupa uang dilaksanakan serentak pada 14 Desember 2022, bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia Mojokerto, dan bantuan sosial bisa diambil pada semua Kantor Pos yang ada di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan anggaran sebesar 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) telah pemutakhiran dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Mojokerto (*Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA*), yang mana dokumen tersebut merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan kerawanan pangan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan anggaran Rp. 102.340.000 (Seratus Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk melakukan sampling keamanan produk segar asal tumbuhan (PSAT) pada 5 (lima) pasar di wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu :

1. Pasar Randegan Kecamatan Dawarblandong
2. Pasar Kemlagi
3. Pasar Kedungmaling Kecamatan Sooko
4. Pasar Pohjejer Kecamatan Gondang
5. Pasar Sawahan Kecamatan Bangsal

Sampling terkait keamanan pangan di Kabupaten Mojokerto diperoleh hasil sebesar 83,3 % sedikit di bawah persentase angka keamanan pangan nasional yaitu 85 % dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah PSAT Aman}}{\text{Jumlah PSAT Diuji}} = \text{Persentase Pangan Aman}$$

Sedang untuk registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan telah menerbitkan 3 (tiga) label putih izin edar atas PSAT-PDUK terhadap pengusaha PSAT sebagai berikut :

Izin edar PSAT PDUK di Desa Candiwatu Kecamatan Pacet, PSAT PDUK di Desa Centong Kecamatan Gondang, dan PSAT PDUK di Dusun Kedungbulus Desa Watesprojo Kecamatan Kemlagi

- e. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan besaran anggaran Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) setelah PAPBD 2022, memberikan paket perikanan tangkap berupa bibit nila, sekat dan karamba kepada 2 (dua) KUB yaitu :
  1. KUB Mina Pikatan Desa Mojogeneng Kecamatan Jatirejo
  2. KUB Candi Makmur Desa Candiwatu Kecamatan Pacet
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- f. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya besaran anggaran Rp. 1.129.250.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk pemberian bantuan kepada 9 (sembilan) kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) dan optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Mojokerto
- g. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 213.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) digunakan untuk pemberian paket produk olahan hasil

perikanan untuk penanggulangan stunting sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) paket di Kecamatan Dlanggu, selain itu juga digunakan untuk Rapat Kerja FORIKAN dan Lomba Cipta Menu Masak Ikan tingkat SLTA/SMK se Kabupaten Mojokerto.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja sasaran strategis diperoleh hasil capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Capaian Kinerja Tahun 2022  
(sesuai Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah)

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,16 (BB)	70,29 (BB)	88,8
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63	69,25	110
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	100 %	117,5 %	117,5
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100 %	87,68 %	87,68
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Merupakan Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2	2	100

3	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	100 % (150) ton	324,2 ton	216,1
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	2100 Kkal/Kap/Hari	2111,8 Kkal/Kap/Hari *)	100
		Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	57 gr/Kap/hari	60,68 gr/Kap/hari **)	106,5
4	Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	1.339.558 Kg	1.559.500 kg	116,4
		Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	159.120 Kg	165.800 kg	104,2
		Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	973.093 Kg	973.24 kg	100

Berikut juga disampaikan capaian kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2022 sebagaimana tabel 2.2.

**Tabel 2.6 (TC.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Perikanan  
Kabupaten Mojokerto**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (tahun n- 2)	Tahun 2022 (tahun n- 1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	Tahun 2021 (tahun n- 2)	Tahun 2022 (tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (tahun n+1)	
1.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	-		100 %	100 %	100 %	100 %	<b>204 %</b>	<b>216,1 %</b>	100 %	100 %	
2.	Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	-		2100 Kkal/kapita/hr	2100 Kkal/kapita/hr	2100 Kkal/Kapita/hr	2100 Kkal/kapita/hr	<b>4687,58 Kkal/kapita/hr</b>	<b>2111,8 Kkal/Kap/Hari</b>	2100 Kkal/kapita/h r	2100 Kkal/kapita/hr	
3.	Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	-	-	57 gr/kapita/hr	57 gr/kapita/hr	57 gr/kapita/hr	57 gr/kapita/hr	<b>92,83 gr/kapita/hr</b>	<b>60,68 gr/Kap/hari</b>	57 gr/kapita/h r	57 gr/kapita/hr	
4.	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya			1.339.558 Kg	1.473.514 Kg	1.620.865 Kg	1.782.952 Kg	<b>1.418.300 Kg</b>	<b>1.559.500 kg</b>	1.339.558 Kg	1.339.558 Kg	
5.	Tingkat Produksi Perikanan Tangkap			159.120 Kg	162.302 Kg	165.548 Kg	170.514 Kg	<b>165.800 Kg</b>	<b>165.800 kg</b>	159.120 Kg	159.120 Kg	
6.	Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan			973.093 Kg	992.555 Kg	1.012.406 Kg	1.032.654 Kg	<b>940.955 Kg</b>	<b>973.244 kg</b>	973.093 Kg	973.093 Kg	

Sesuai dengan tabel di atas, capaian kinerja Tahun Anggaran 2022 ada peningkatan pada beberapa indikator, bisa dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras) dari target 100 % bisa terealisasi dan mencapai 216,1 % atau sebesar 324,2 ton. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan beras di Kabupaten Mojokerto sangat tercukupi.
- 2) Sesuai dengan perhitungan Neraca Bahan Makanan yang merupakan representasi dari data ketersediaan pangan akan memberikan gambaran ketersediaan zat gizi berupa energi, protein dan lemak untuk konsumsi penduduk sehari-hari. Pada 2022 Indikator Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi adalah 2111,8 Kkal/Kapita/hari mencapai 100 % dari target, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan energi untuk konsumsi masih sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 3) Indikator Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein penduduk Kabupaten Mojokerto sebesar 60,68 gram/kapita/hari pada 2021 dari angka ideal 63 gram/kapita/hari, ada penurunan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2021, mengingat penghitungannya memakai nilai rata-rata dari Angka Kecukupan Gizi Jawa Timur.
- 4) Pada indikator tingkat produksi perikanan budidaya realisasi pada 2022 adalah 1.559.500 kg atau sebesar 116,4 % dari target, capaian kinerja positif tersebut didukung dengan pengadaan indukan lele pada Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Mojokerto sebanyak 10 paket serta bantuan-bantuan modal dan peralatan budidaya pada beberapa kelompok budidaya perikanan.
- 5) Sedangkan pada indikator tingkat produksi perikanan tangkap sampai dengan akhir 2022 terealisasi 165.800 Kg dengan capaian 104,2 % dari target hal ini menunjukkan walaupun wilayah Kabupaten Mojokerto lebih banyak wilayah daratan, namun potensi perikanan tangkap di perairan umum cukup bagus, namun hal ini masih sangat jauh dengan target nasional tahun 2020 yaitu 7,53 juta ton.

- 6) Sampai akhir 2022 tingkat produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 973,244 Kg atau sebesar 100 % dari target, hal ini menunjukkan bahwa kelompok pengolah dan pemasar perikanan (POKLAHSAR) banyak peningkatan dalam pemenuhan permintaan pasar akan berbagai jenis olahan hasil perikanan.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Pertambahan penduduk dan tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan terhadap pangan, energi, dan air. Pemenuhan kebutuhan akan permintaan-permintaan tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama, sehingga ketahanan terhadap pangan, energi, dan air merupakan keniscayaan. Sebagai salah satu peran penting dalam kehidupan manusia, ketahanan pangan menjadi prasyarat mutlak.

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Pemenuhan kebutuhan dan menjaga ketahanan pangan masyarakat menjadi tugas penting Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Eksistensi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis terkait dengan ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun regional. Fungsi dari Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto sangatlah strategis dengan permasalahan dan isu-isu penting yang berkembang, antara lain :

1. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, dengan isu yang berkembang antara lain :
  - (a) Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang rendah dalam mengakses pangan ada pada golongan masyarakat miskin, yang kebanyakan tinggal di pedesaan di mana umumnya adalah petani dan nelayan.
  - (b) Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah:

- Infrastruktur distribusi.
  - Sarana dan prasarana pasca panen.
  - Pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah.
  - Sistem informasi pasar.
  - Keterbatasan lembaga pemasaran daerah.
  - Hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi.
  - Kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan.
  - Adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.
- (c) Penjaminan Stabilitas Harga Pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena :
- Masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen,
  - Harga pangan dunia semakin tidak menentu akibat adanya perang Rusia dan Ukraina, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

## 2. Cadangan pangan.

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :

- (a) Sistem cadangan pangan daerah selain beras (daging, telur, sayuran, bawang merah, bawang putih) untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam ataupun non alam minimal 3 (tiga) bulan
- (b) Kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya
- (c) Sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan

Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan, Poktan, TTI ataupun lembaga usaha lainnya

3. Rendahnya pasokan utama pangan pokok sebagai ketersediaan domestik dan stabilitas pasokan pangan

Bahan pangan pokok dan strategis harus tersedia dalam jumlah yang memadai, memenuhi standar mutu serta pada tingkat harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim merupakan tantangan dalam menjamin distribusi pangan agar tetap lancar sampai ke seluruh wilayah konsumen sepanjang waktu. Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja sistem distribusi di Kabupaten Mojokerto. Harga yang terlalu berfluktuasi dapat merugikan petani produsen, pengolah, pedagang hingga konsumen, berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Kebijakan yang terkait dengan distribusi pangan dimaksudkan untuk memperlancar pasokan dan memfasilitasi keterjangkauan masyarakat, sekaligus memproteksi sistem ekonomi dalam daerah dari persaingan yang kurang menguntungkan khususnya tekanan perdagangan global. Isu terkini terkait kelangkaan minyak goreng, hal ini menandakan bahwa distribusi stok pangan yang ada pada distributor berjalan lambat. Demikian juga dengan naiknya harga kedelai di pasaran, berkurangnya pengembangan kedelai lokal karena menghadapi beberapa tantangan berupa alih fungsi lahan di daerah potensial dan persaingan penggunaan lahan dengan komoditas pangan strategis lainnya. Kedua permasalahan tersebut di atas membuat Satuan Tugas Pangan Kabupaten Mojokerto segera mengambil tindakan dengan lebih intensif melakukan sidak pada gudang-gudang distributor yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto.

4. Rendahnya angka produksi perikanan dan hanya cukup memenuhi konsumsi ikan domestik (552,0 ton sesuai data statistik perikanan Jawa Timur, 2020)

Ada beberapa faktor penyebab rendahnya produksi ikan di Kabupaten Mojokerto, antara lain terbatasnya area penangkapan ikan yang terbatas pada sungai dan waduk, mengingat Kabupaten Mojokerto wilayahnya lebih banyak daratan daripada perairan, selain itu pemanfaatan sungai yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah. Di samping itu peralatan yang digunakan masih sederhana serta harga ikan konsumsi masih dipengaruhi oleh tengkulak.

5. Kurangnya akses individu (keterjangkauan makanan dan preferensi makanan individu) dan pemanfaatan (keamanan pangan dan manfaat gizi) untuk mencapai ketahanan pangan

Saat ini pertanyaan yang timbul adalah dapatkah Kabupaten Mojokerto memproduksi pangan yang cukup pada tingkat harga yang pantas dan terjangkau bagi kelompok miskin serta tidak merusak lingkungan? Selanjutnya untuk mengetahui pentingnya keamanan bahan pangan untuk kesehatan masyarakat, melalui berbagai upaya dan memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk dapat memilah dan memilih produk pangan yang berkualitas dan baik untuk kesehatan pada masyarakat serta memenuhi B2SA. Perubahan preferensi dan gaya hidup konsumen dalam memilih pangan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Mojokerto, di sepanjang rantai pangan untuk dapat bersama-sama menjaga keamanan pangan. Oleh karena itu, sinergisme dan keterpaduan kajian risiko keamanan pangan sangat penting untuk meningkatkan kontribusi kajian risiko sebagai landasan ilmiah dalam program keamanan pangan, antara lain dengan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat

menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*) dan atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Sejak pertengahan 2021, ketika Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKD) mendelegasikan wewenang ke pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pangan dan Perikanan bergerak cepat dengan melakukan sampling ke beberapa pasar di wilayah Kabupaten Mojokerto terkait keamanan pangan, selanjutnya mengirimkan hasil uji ke laboratorium di Surabaya. Apabila hasilnya aman untuk dikonsumsi, maka bahan lokal tersebut diterbitkan izin edarnya, dengan sasaran utama para pelaku usaha penggilingan padi, pengusaha sayur, buah organik dan pedagang sayur/buah di pasar

6. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, dengan permasalahan dan isu yang berkembang adalah :
  - (a) Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih jauh dari harapan. Oleh karena itu ada SDG's *Acceleration Frame Work* (MAF). Metodologi MAF adalah kerangka metodologi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan *stakeholders* berupa pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan *bottleneck* dalam upaya mencapai target SDG's dengan kategori *off-track* sekaligus mempercepat solusi untuk memecahkan *bottleneck* tersebut.
  - (b) Faktor penyebab belum berkembangnya pangan lokal adalah:

- belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya
  - belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta
  - belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal
  - rendahnya citra pangan lokal
  - belum optimalnya Pengembangan program perbaikan gizi yang *cost effective*, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A.
7. Peningkatan mutu dan keamanan pangan, isu dan permasalahan yang terjadi antara lain :
- (a) Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap rasa, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan.
  - (b) Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.
  - (c) Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan.

## 2.4 Reviu Terhadap RKPD

Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah memasuki tahun ketiga pembangunan dalam rentang waktu pelaksanaan RPJMD tahun 2021–

2026, dengan visi yang ingin diwujudkan adalah “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Dalam memantapkan ketahanan pangan Kabupaten Mojokerto rancangan program, kegiatan, sub kegiatan yang diusulkan atau sudah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto dengan mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 yang telah ditetapkan dan merupakan salah satu rancangan dalam memantapkan ketahanan pangan di daerah, baik yang prioritas maupun non prioritas. Untuk lebih jelasnya rancangan program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran T-C.31.

Pada tahun anggaran 2024 pagu indikatif pada RKPD Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto ditetapkan sebesar Rp. 8.549.201.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Satu Ribuan Rupiah), sebesar Rp. 5.503.943.000 (Lima Milyar Lima Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribuan Rupiah) untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

**Tabel 2.7**

**(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2023  
Kabupaten Mojokerto**

**Dinas Pangan dan Perikanan**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Dispari	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,76 (A)		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Dispari	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,76 (A)		Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dispari	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	20 %		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dispari	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	20 %		Disesuaikan dengan kebutuhan

3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dispari	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	97%		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dispari	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	97%		Disesuaikan dengan kebutuhan
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dispari	Persentase Desa Rawan Pangan yang Ditangani	8 %		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dispari	Persentase Desa Rawan Pangan yang Ditangani	8 %		Disesuaikan dengan kebutuhan
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dispari	Persentase Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	50%		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dispari	Persentase Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	50%		Disesuaikan dengan kebutuhan
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dispari	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2 %		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dispari	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2 %		Disesuaikan dengan kebutuhan
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dispari	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	10 %		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dispari	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	10 %		Disesuaikan dengan kebutuhan

8.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dispari	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2 %		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dispari	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2 %		Disesuaikan dengan kebutuhan

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Mojokerto untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Pada Tahun 2023 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2023 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan Hasil Reses. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka perangkat akan melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2023, sesuai kriteria yang telah ditentukan. Rincian usulan masyarakat dan tindaklanjut hasil verifikasi dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat dilihat pada tabel TC.32 berikut :

**Tabel 2.8**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**TA. 2024 Kabupaten Mojokerto**  
(Tabel T-C.32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pokdakan Sumber Makmur Desa Kejagan Kec. Trowulan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		Pokir
		Pokdakan Dusun Sumberwaru Desa Kembangsri Kec. Ngoro			Pokir
		Pokdakan Desa Watukenongo Kec. Pungging			Pokir
		Pokdakan Desa Padi Kec. Gondang			Pokir

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, secara vertikal pada tingkat kementerian ada 3 (tiga) kementerian yang terkait yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Pangan Nasional. Namun Badan Pangan Nasional baru dibentuk pada 2021 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2021 yang merupakan lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Mengingat Badan Pangan Nasional masih baru berdiri, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto secara vertikal masih terkait pada Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pada tingkat provinsi, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang terkait yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Tentunya tujuan dan sasaran strategis dari Renstra masing-masing kementerian dan perangkat daerah di Provinsi Jawa Timur terkait penyusunan perencanaan perangkat daerah di Kabupaten/Kota harus mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan nasional dan provinsi.

##### **1. Kementerian Pertanian**

Visi Kementerian Pertanian tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah **“Pangan Berdaulat Petani Sejahtera Indonesia Menuju Lumbung Pangan Tahun 2045”**. Untuk mencapai misi tersebut telah ditetapkan misi Kementerian Pertanian sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kedaulatan Pangan
2. Mewujudkan Industri Pangan

3. Mewujudkan Kesejahteraan Petani
4. Mewujudkan Reformasi Mental dan Reformasi Birokrasi

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan Ketersediaan dan Ekspor Pangan
2. Meningkatkan Lapangan Kerja
3. Mengurangi Kemiskinan
4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Indonesia Berdaulat Pangan.
2. Lapangan Kerja Meningkat/Penangguran Menurun
3. Kemiskinan Menurun.
4. Kesejahteraan Petani Meningkatkan.

Arah Kebijakan untuk Kebutuhan Pangan tahun 2020 – 2024

1. Penguatan Profesionalisme SDM Petani dan Penyuluh
2. Modernisasi Pertanian
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan untuk pangan
4. Penguatan Daya Saing dan Ekspor Pangan

## **2. Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi KKP tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia**

**Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam penjabaran misi pembangunan kelautan dan perikanan, tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan : meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.

Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, dengan tujuan:

1. Optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
2. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;

3. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
5. optimalnya pengelolaan ruang laut.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan

Dalam menjalankan Rencana Kerja pada kegiatan tahun 2024, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto memerlukan tujuan dan sasaran program dan kegiatan agar kegiatan yang dijalankan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Renja Tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Potensi Sumber Daya Unggulan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	100 %
			Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Energi	2100 Kkal/Kap/Hr
			Angka Kecukupan Gizi Tingkat Ketersediaan Protein	57 Gram/Kap/Hr
2.		Meningkatnya Produksi Perikanan	Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	1.620.865 Kg
			Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	165.548 Kg

			Tingkat Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	1.012.406 Kg
3.		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	84,76 (A)

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2024 antara lain adalah :

1. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Mojokerto
2. Pencapaian SDG's

**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				
MISI : Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Meningkatkan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah	1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan	1. Peningkatan kemandirian pangan daerah	1. Pemberdayaan lumbung pangan	
			2. Pembinaan dan pemberdayaan KWT dalam hal pemantapan pangan local, produk unggulan dan B2SA serta generasi muda bertani dalam hal meningkatkan penyediaan pangan keluarga	
			3. Meningkatkan sistem pengendalian dan penanganan rawan pangan	
			4. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), Distribusi ,dan Ketersediaan (Stok Pangan)	
	2. Meningkatnya produksi perikanan	1. Peningkatan produksi perikanan	2. Peningkatan Keamanan Pangan	1. Pengawasan Keamanan Pangan
				1. Pembentukan Otoritas Kewenangan Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)
				1. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pembinaan usaha perikanan budidaya dan tangkap untuk meningkatkan minat masyarakat
				1. Penguatan Permodalan Usaha berupa sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan budidaya dan tangkap
	2. Peningkatan konsumsi dan keanekaragaman pangan berbasis olahan ikan		1. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pembinaan usaha pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan minat masyarakat	
			2. Penguatan Permodalan Usaha berupa sarana dan prasarana pendukung usaha pengolahan hasil perikanan	
			3. Sosialisasi gemar makan ikan	

Terkait dengan pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's), Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto turut aktif dalam pencapaian tujuan nomor 2 (dua) yaitu “Menghilangkan

Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan”. Targetnya adalah pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional. Indikator Pencapaian SDG’s Dinas Pangan dan Perikanan adalah :

1. Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH), pada 2022 tercapai 92,8 dari target 97,20 ;
2. Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Mojokerto pada 2022 tercapai sebesar 48,17 kg / kapita / tahun, lebih tinggi dari konsumsi ikan Provinsi Jawa Timur sebesar 42,45 kg / kapita / tahun ;

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mana proses klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur disesuaikan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, ada beberapa indikator maupun output sub kegiatan disesuaikan.

Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 terdapat 8 (delapan) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan, dengan pagu anggaran sesuai kebutuhan sebesar Rp. 8.834.210.000,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dengan pagu indikatif pada RKPD 2024 sebesar Rp. 8.549.210.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 dan prakiraan maju Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 3.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto**  
**(Tabel T-C.33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
-1	-2	-3	-4	-5.00	6.00	-7.00	8.00	9.00	10.00
<b>DINAS PANGAN DAN PERIKANAN</b>					<b>10,812,360,000.00</b>				<b>12,617,729,000.00</b>
01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai Sakip Perangkat Daerah</b>	<b>KAB. MOJOKERTO</b>	<b>84,26 (A)</b>	<b>6,586,729,000.00</b>	<b>APBD</b>		<b>84,76 (A)</b>	<b>6,648,729,000.00</b>
01	2.001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB. MOJOKERTO	100%	15,000,000.00	APBD		100%	20,000,000.00
01	2.001	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB. MOJOKERTO	2 Dokumen	7,500,000.00	APBD		2 Dokumen	10,000,000.00
01	2.001	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB. MOJOKERTO	2 Laporan	7,500,000.00	APBD		2 Laporan	10,000,000.00
01	2.002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KAB. MOJOKERTO	100%	5,964,929,000.00	APBD		100%	5,964,929,000.00
01	2.002	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB. MOJOKERTO	39 orang/bulan	5,964,929,000.00	APBD		39 orang/bulan	5,964,929,000.00

		01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	KAB. MOJOKERTO	100%	166,000,000.00	APBD		100%	170,000,000.00
		01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB. MOJOKERTO	1 Paket	30,000,000.00	APBD		1 Paket	32,000,000.00
		01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KAB. MOJOKERTO	1 Paket	10,000,000.00	APBD		1 Paket	10,000,000.00
		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	KAB. MOJOKERTO	1 Paket	30,000,000.00	APBD		1 Paket	30,000,000.00
		01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	KAB. MOJOKERTO	1 Paket	34,000,000.00	APBD		1 Paket	34,000,000.00
		01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KAB. MOJOKERTO	12 laporan	7,000,000.00	APBD		12 laporan	7,000,000.00
		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. MOJOKERTO	12 Laporan	55,000,000.00	APBD		12 Laporan	57,000,000.00
		01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	KAB. MOJOKERTO	100%	151,800,000.00	APBD		100%	151,800,000.00
		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KAB. MOJOKERTO	12 Laporan	75,000,000.00	APBD		12 Laporan	75,000,000.00

		01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KAB. MOJOKERTO	12 Laporan	76,800,000.00	APBD		12 Laporan	76,800,000.00
		01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	KAB. MOJOKERTO	100%	289,000,000.00	APBD		100%	342,000,000.00
		01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KAB. MOJOKERTO	30 Unit	62,000,000.00	APBD		30 Unit	65,000,000.00
		01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KAB. MOJOKERTO	4 Unit	200,000,000.00	APBD		4 Unit	250,000,000.00
		01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	KAB. MOJOKERTO	12 Unit	27,000,000.00	APBD		12 Unit	27,000,000.00
2	09				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>								
2	09	02			<b>Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</b>	<b>Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan</b>	<b>KAB. MOJOKERTO</b>	<b>40%</b>	<b>675,000,000.00</b>	<b>APBD</b>		<b>60%</b>	<b>835,000,000.00</b>

2	0	0	2.		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan infrastruktur lumbung pangan	KAB. MOJOKERTO	2 kelompok	675,000,000.00	APBD		2 kelompok	835,000,000.00
2	0	0	2.	0	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	KAB. MOJOKERTO	2 Unit	675,000,000.00	APBD		2 Unit	835,000,000.00
2	0	0			<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)</b>	<b>KAB. MOJOKERTO</b>	<b>97%</b>	<b>1,080,000,000.00</b>	<b>APBD</b>		<b>98%</b>	<b>1,636,000,000.00</b>
2	0	0	2.		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan dan Laporan Harga Pangan	KAB. MOJOKERTO	3 Dokumen	310,000,000.00	APBD		3 Dokumen	457,000,000.00
2	0	0	2.	0	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	KAB. MOJOKERTO	1 Laporan	150,000,000.00	APBD		1 Laporan	85,000,000.00
2	0	0	2.	0	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	KAB. MOJOKERTO	1 Laporan	60,000,000.00	APBD		1 Laporan	72,000,000.00
2	0	0	2.	0	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	KAB. MOJOKERTO	1 Dokumen	50,000,000.00	APBD		1 Dokumen	50,000,000.00
2	0	0	2.	0	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	KAB. MOJOKERTO	2 Unit	50,000,000.00	APBD		2 Unit	250,000,000.00

2	0	0	2.		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan gabah dan sarana prasarana	KAB. MOJOKERTO	39 ton	500,000,000.00	APBD		53 ton	692,000,000.00
2	0	0	2.	0	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	KAB. MOJOKERTO	39 ton	450,000,000.00	APBD		53 ton	612,000,000.00
2	0	0	2.	0	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	KAB. MOJOKERTO	39 ton	50,000,000.00	APBD		53 ton	80,000,000.00
2	0	0	2.		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan	KAB. MOJOKERTO	53 Desa	270,000,000.00	APBD		53 Desa	487,000,000.00
2	0	0	2.	0	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	KAB. MOJOKERTO	1 dokumen	50,000,000.00	APBD		1 dokumen	100,000,000.00
2	0	0	2.	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KAB. MOJOKERTO	1 Laporan	200,000,000.00	APBD		1 Laporan	357,000,000.00
2	0	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	KAB. MOJOKERTO	1 Laporan	20,000,000.00	APBD		1 Laporan	30,000,000.00

2	0	0				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rawan Pangan yang Ditangani	KAB. MOJOKERTO	17%	50,000,000.00	APBD		25%	210,000,000.00
2	0	0	2.	0		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen penyusunan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	KAB. MOJOKERTO	1 dokumen	25,000,000.00	APBD		1 dokumen	100,000,000.00
2	0	0	2.	0	0	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	KAB. MOJOKERTO	1 dokumen	25,000,000.00	APBD		1 dokumen	100,000,000.00
2	0	0	2.	0		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang dilakukan penanganan kerawanan pangan	KAB. MOJOKERTO	2 desa	25,000,000.00	APBD		2 desa	110,000,000.00
2	0	0	2.	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	KAB. MOJOKERTO	1 Laporan	25,000,000.00	APBD		1 Laporan	110,000,000.00
2	0	0				<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>Persentase jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan</b>	<b>KAB. MOJOKERTO</b>	<b>70%</b>	<b>230,000,000.00</b>	<b>APBD</b>		<b>80%</b>	<b>385,000,000.00</b>
2	0	0	2.	0		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengawasan keamanan pangan	KAB. MOJOKERTO	7 lokasi	230,000,000.00	APBD		10 lokasi	385,000,000.00

2	0	0	2.	0	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	KAB. MOJOKERTO	1 Dokumen	50,000,000.00	APBD	1 Dokumen	111,000,000.00	
2	0	0	2.	0	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KAB. MOJOKERTO	2 Sertifikat	80,000,000.00	APBD	2 Sertifikat	112,000,000.00	
2	0	0	2.	0	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KAB. MOJOKERTO	1 Dokumen	50,000,000.00	APBD	1 Dokumen	51,000,000.00	
2	0	0	2.	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KAB. MOJOKERTO	1 Dokumen	50,000,000.00	APBD	1 Dokumen	111,000,000.00	
3	2	5			<b>URUSAN PEERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>								
3	2	0			<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap</b>	<b>KAB. MOJOKERTO</b>	<b>2%</b>	<b>220,000,000.00</b>	<b>APBD</b>	<b>2%</b>	<b>242,000,000.00</b>	
3	2	0	2.	0	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	KAB. MOJOKERTO	6 kelompok	220,000,000.00	APBD	6 kelompok	242,000,000.00	
3	2	0	2.	0	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	KAB. MOJOKERTO	1 dokumen	20,000,000.00	APBD	1 dokumen	32,000,000.00	

3	2	0	2.	0	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	KAB. MOJOKERTO	24 Unit	100,000,000.00	APBD	24 Unit	105,000,000.00
3	2	0	2.	0	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	KAB. MOJOKERTO	3 Unit	100,000,000.00	APBD	3 Unit	105,000,000.00
3	2	0			<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya</b>	<b>KAB. MOJOKERTO</b>	<b>10%</b>	<b>1,665,631,000.00</b>	<b>APBD</b>	<b>10%</b>	<b>2,158,000,000.00</b>
3	2	0	2.	0	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok budidaya yang menerima bantuan, pembinaan dan pemantauan	KAB. MOJOKERTO	6 kelompok	1,665,631,000.00	APBD	6 kelompok	2,158,000,000.00
3	2	0	2.	0	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KAB. MOJOKERTO	1 dokumen	25,000,000.00	APBD	1 dokumen	51,000,000.00
3	2	0	2.	0	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KAB. MOJOKERTO	1 Unit	1,380,000,000.00	APBD	1 Unit	1,655,000,000.00
3	2	0	2.	0	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KAB. MOJOKERTO	6 Unit	200,000,000.00	APBD	6 Unit	202,000,000.00
3	2	0	2.	0	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	KAB. MOJOKERTO	1 Dokumen	25,000,000.00	APBD	1 Dokumen	50,000,000.00

3	2	0	2.	0	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	KAB. MOJOKERTO	50 Orang	35,631,000.00	APBD	50 Orang	200,000,000.00
3	2	0			<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</b>	<b>KAB. MOJOKERTO</b>	<b>2%</b>	<b>305,000,000.00</b>	<b>APBD</b>	<b>2%</b>	<b>503,000,000.00</b>
3	2	0	2.	0	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	KAB. MOJOKERTO	50 Unit Usaha	205,000,000.00	APBD	50 Unit Usaha	400,000,000.00
3	2	0	2.	0	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	KAB. MOJOKERTO	50 Unit Usaha	205,000,000.00	APBD	50 Unit Usaha	400,000,000.00
3	2	0	2.	0	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	KAB. MOJOKERTO	4 Pelaku Usaha	100,000,000.00	APBD	4 Pelaku Usaha	103,000,000.00
3	2	0	2.	0	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	KAB. MOJOKERTO	4 Pelaku Usaha	100,000,000.00	APBD	4 Pelaku Usaha	103,000,000.00

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Penyusunan rencana program. Kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto 2021-2026, RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026 serta mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional dan hasil penelaahan usulan masyarakat / pemangku kepentingan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD 2023.

Berdasarkan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan tersebut, maka dirumuskan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2022 sebagaimana tabel Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2023.

## 4.1

Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024  
Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto

No.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	U P	B / L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	APBD KAB (Rp).	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET			SKP D Terk ait	Pagu (Rp)	KL	Rp .	D/TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>DINAS PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MOJOKERTO</b>										<b>10,812,360,000</b>					
1	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Nilai Sakip Perangkat Daerah	84,26 (A)	DISPARI	6,586,729,000	-	-	-	-	-
	01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target		100%	DISPARI	15,000,000	-	-	-	-	-
	01.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			2 Dokumen	DISPARI	7,500,000	-	-	-	-	-
	01.01.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			2 Laporan	DISPARI	7,500,000	-	-	-	-	-



				0	2	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	DISPARI	7,000,000	-	-	-	-	-
				1	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	DISPARI	55,000,000	-	-	-	-	-
				0	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan		100%	DISPARI	151,800,000	-	-	-	-	-
				1	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	DISPARI	75,000,000	-	-	-	-	-
				0	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	DISPARI	76,800,000	-	-	-	-	-

				0 1 0 9	2 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		100%	DISPARI	289,000,000	-	-	-	-	-
				0 1 9	2 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			30 Unit	DISPARI	62,000,000	-	-	-	-	-
				0 1 9	2 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi			4 Unit	DISPARI	200,000,000	-	-	-	-	-
				0 1 9	2 0 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi			12 Unit	DISPARI	27,000,000	-	-	-	-	-

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																		
2	2	0	0			Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	40%	KAB. MOJOKERTO	675,000,000	-	-	-	-	-
	2	0	0	2		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan infrastruktur lumbung pangan		2 kelompok	KAB. MOJOKERTO	675,000,000	-	-	-	-	-
	2	0	0	2	0	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia			2 Unit	KAB. MOJOKERTO	675,000,000	-	-	-	-	-
3	2	0	0			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	97%	KAB. MOJOKERTO	1,080,000,000	-	-	-	-	-
	2	0	0	2		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan dan Laporan Harga Pangan		3 Dokumen	KAB. MOJOKERTO	310,000,000	-	-	-	-	-
	2	0	0	2	0	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			1 Laporan	KAB. MOJOKERTO	150,000,000	-	-	-	-	-
	2	0	0	2	0	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			1 Laporan	KAB. MOJOKERTO	60,000,000	-	-	-	-	-

2	0	0	2	0	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			1 Dokumen	KAB. MOJOKERTO	50,000,000	-	-	-	-	-
2	0	0	2	0	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan			2 Unit	KAB. MOJOKERTO	50,000,000	-	-	-	-	-
2	0	0	2	0	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			Jumlah pengadaan gabah dan sarana prasarana			39 ton	KAB. MOJOKERTO	500,000,000	-	-	-	-	-
2	0	0	2	0	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			39 ton	KAB. MOJOKERTO	450,000,000	-	-	-	-	-
2	0	0	2	0	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara			39 ton	KAB. MOJOKERTO	50,000,000	-	-	-	-	-
2	0	0	2	0	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan			53 Desa	KAB. MOJOKERTO	270,000,000	-	-	-	-	-
2	0	0	2	0	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			1 dokumen	KAB. MOJOKERTO	50,000,000	-	-	-	-	-

	2	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1 Laporan	KAB. MOJOKERTO	200,000,000	-	-	-	-	-
	2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun		1 Laporan	KAB. MOJOKERTO	20,000,000	-	-	-	-	-
4	2	0	0			Program Penanganan Kerawanan Pangan			Persentase Desa Rawan Pangan yang Ditangani	17%	KAB. MOJOKERTO	50,000,000	-	-	-	-	-
	2	0	0	2	0	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Jumlah dokumen penyusunan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan		1 dokumen	KAB. MOJOKERTO	25,000,000	-	-	-	-	-
	2	0	0	2	0	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		1 dokumen	KAB. MOJOKERTO	25,000,000	-	-	-	-	-

	2	0	0	2		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah desa yang dilakukan penanganan kerawanan pangan		2 desa	KAB. MOJOKERTO	25,000,000	-	-	-	-	-
	2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Pangan Kabupaten/Kota		1 Laporan	KAB. MOJOKERTO	25,000,000	-	-	-	-	-	-
5	2	0	0			Program Pengawasan Keamanan Pangan			Persentase jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	70%	KAB. MOJOKERTO	230,000,000	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	2		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah lokasi pengawasan keamanan pangan	7 lokasi	KAB. MOJOKERTO	230,000,000	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	2	0	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina		1 Dokumen	KAB. MOJOKERTO	50,000,000	-	-	-	-	-	-
	2	0	0	2	0	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		2 Sertifikat	KAB. MOJOKERTO	80,000,000	-	-	-	-	-	-

	2	0	0	2	0	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	KAB. MOJOKERTO	50,000,000	-	-	-	-	-
	2	0	0	2	0	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	KAB. MOJOKERTO	50,000,000	-	-	-	-	-
	3	2	5				URUSAN PEERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
	6	3	2	0			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	KAB. MOJOKERTO	220,000,000	-	-	-	-
	3	2	0	2	0	01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap		6 kelompok	KAB. MOJOKERTO	220,000,000	-	-	-	-	-

	3	2	0	2	0	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 dokumen	KAB. MOJOKERTO	20,000,000	-	-	-	-	-
	3	2	0	2	0	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia		24 Unit	KAB. MOJOKERTO	100,000,000	-	-	-	-	-
	3	2	0	2	0	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		3 Unit	KAB. MOJOKERTO	100,000,000	-	-	-	-	-
7	3	2	0	2	0	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	10%	KAB. MOJOKERTO	1,665,631,000	-	-	-	-	-
	3	2	0	2	0	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah kelompok budidaya yang menerima bantuan, pembinaan dan pemantauan		6 kelompok	KAB. MOJOKERTO	1,665,631,000	-	-	-	-	-



	3	2	0	.	0		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		50 Orang	KAB. MOJOKERTO	35,631,000	-	-	-	-	-
8	3	2	0				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	2%	KAB. MOJOKERTO	305,000,000	-	-	-	-	-
	3	2	0	.	2		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		50 Unit Usaha	KAB. MOJOKERTO	205,000,000	-	-	-	-	-



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024 telah disusun dalam dokumen RENJA ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi Perangkat Daerah.

Pada tahun 2024, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto telah menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) program, 16 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Rencana Kerja tahun 2024 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto.

Output Rencana Kerja Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto adalah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi serta sasaran kepada masyarakat. Diharapkan Rencana Kerja 2024 Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto ini menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan acuan untuk tahun-tahun yang akan datang.